

**KAPASITAS PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DALAM
PEMBANGUNAN KAWASAN TEKNOPOLITAN (STUDI PEMBANGUNAN
KAWASAN PENDIDIKAN)**

Oleh :

Astri Priyani Meiningrum

E-mail : astripriyanimeiningrum1@gmail.com

Pembimbing : Auradian Marta, S.IP, MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl H. R. Soebrantas km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Abstrak

Studi ini dilatar belakangi perihal permasalahan pembangunan kawasan teknopolitan khususnya kawasan pendidikan di Kabupaten Pelalawan Kecamatan Langgam. Berupaya untuk mengetahui apasaja upaya Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pembangunan kawasan pendidikan. Serta mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pembangunan kawasan pendidikan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan nyata di lapangan secara sistematis dan akurat terkait fakta maupun unit analisis penelitian, serta pengamatan lapangan berdasarkan data (informasi) tertentu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan.

Hasil penelitian menjelaskan kapasitas pemerintah berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing dinas yang ikut serta dalam proses pembangunan kawasan pendidikan tersebut. Dalam pelaksanaannya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai andil besar dari pembuatan Masterplan. Upaya yang dilakukan dalam pembangunan kawasan pendidikan tersebut meliputi upaya politis dan upaya teknis, dimana upaya politis dilakukan oleh BAPPEDA dalam menyiapkan anggaran untuk melobi DPRD dalam pencairan anggaran. Upaya teknis dilakukan dalam proses pelepasan lahan dan perizinan dari Menteri yang bersangkutan. Kemudian kendala yang di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan yaitu anggaran dan pelepasan lahan. Anggaran yang ada belum cukup untuk proses pembangunan kawasan pendidikan seluruhnya, dan hanya pembangunan Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (STTP) yang tersedia, sehingga kawasan pendidikan yang targetnya tahun 2017 sudah rampung, namun saat ini masih STTP yang selesai pembangunannya. Kendala pelepasan lahan juga menjadi masalah yang penting karena lambatnya proses pelepasan lahan membuat proses pembangunan belum dapat dilakukan.

Kata Kunci : Kapasitas Pemerintah, Teknopolitan, Kawasan Pendidikan.

**KAPASITAS PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DALAM
PEMBANGUNAN KAWASAN TEKNOPOLITAN (STUDI PEMBANGUNAN
KAWASAN PENDIDIKAN)**

Oleh :

Astri Priyani Meiningrum

E-mail : astripriyanimeiningrum1@gmail.com

Pembimbing : Auradian Marta, S.IP, MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl H. R. Soebrantas km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Abstract

The background studies concerning regional development issues, particularly teknopolitan education area in Pelalawan District of Langgam. Attempts to find out what are the Government's efforts Pelalawan in the development of educational areas. And knowing the constraints faced by the Government of Pelalawan in the development of educational areas.

This type of research is descriptive qualitative approach. The study aimed to describe the real situation on the ground to systematically and accurately related facts and research analysis unit, as well as field observations based on data (information) in particular. Methods of data collection is by interview, documentation and observation.

The results of the study describes the capacity of government based on the duties and functions of each agency participating in the development process of the educational areas. In the implementation of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) and the Technical Implementation Unit (UPT) has a big share of the manufacturing Masterplan. Efforts are being made in the development of the educational areas covering political effort and technical effort, in which the political effort made by BAPPEDA in preparing the budget to lobby parliament in budget disbursement. Technical efforts made in the process of land release and licensing of the Minister concerned. Then the constraints faced by the Government Pelalawan namely the budget and land release. That there is not enough budget for education regional development process entirely, and only the construction of the College of Technology Pelalawan (STTP) available, so that the area of education that target in 2017 have been completed, but it is still STTP is completed. Constraints land release has also become an important issue because of the slow process of land pelepasan make the development process can not be done.

Keywords: Government Capacity, Teknopolitan, Education Department

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknopolitan adalah konsepsi kawasan berdimensi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, yang memiliki sentra kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan produktif dan gerakan Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan masyarakat yang mendukung percepatan perkembangan inovasi, difusi dan pembelajaran. Sementara itu, Kawasan teknopolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat pada wilayah tertentu sebagai sistem pembangunan yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem inovasi. (Dokumen Pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional Tahun 2014)

Kawasan Teknopolitan Pelalawan merupakan suatu kawasan industri yang terpadu dengan perguruan tinggi sebagai pencetak tenaga kerja terampil dan pusat riset sebagai pendorong inovasi, dan ini dibangun atas dukungan investasi swasta dan Pemerintah. Pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan merupakan inisiatif Pemkab Pelalawan mewadahi pencapaian visi MP3EI 2011-2025 sekaligus merealisasikan pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan 2011-2016. (DokumenPembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional Tahun 2014)

Ditinjau dari kebijakan nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, khususnya pengembangan Koridor Ekonomi Pulau Sumatera, bahwa pengembangan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan yang berbasis pada industri hilir kelapa sawit merupakan salah satu upaya yang strategis untuk mengembangkan wilayah berbasis potensi sumberdaya alam dengan mengandalkan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan kolaborasi yang terpadu antara pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan, industri, dan masyarakat. (Dokumen Pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional Tahun 2014)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016. Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Pelalawan adalah memantapkan kemandirian pembangunan ekonomi dengan salah satu sasarannya berkembangnya industri dan terwujudnya pusat-pusat ekonomi unggulan daerah, dengan indikator bertambahnya jumlah kluster ekonomi di Kabupaten Pelalawan. Sedangkan dalam Misi I salah satu sasaran pembangunan bidang sumberdaya manusia adalah pembangunan perguruan tinggi di Kabupaten Pelalawan.

Tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dalam pencapaian visi dan misi kawasan teknopolitan adalah:

1. Masterplan oleh BPPT.
2. Penyediaan anggaran pembebasan lahan yang dialokasikan di dalam APBD Kabupaten Pelalawan sejak Tahun 2012 sebesar Rp. 60 Miliar.
3. Pembangunan infrastruktur jalan dari dan menuju kawasan.
4. Pengusulan pelepasan lahan Kawasan Teknopolitan Pelalawan dari status Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) ke Kementerian Kehutanan.
5. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas dengan Kapasitas 15 MW dan akan terus ditingkatkan sampai dengan 200 MW. (Dokumen Pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional Tahun 2014)

Untuk mewujudkan pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan yang tepat sasaran, tepat manfaat dan berkelanjutan, secara umum kawasan perencanaan pembangunan zona A: zona merupakan Kegiatan Pendidikan dan *Research dan Development Center* meliputi Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan, Pusat Penelitian yang ditargetkan pembangunannya tahun 2015-2018, namun sampai saat ini

pembangunannya baru tahap pembangunan Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan sementara untuk *Research dan Development Center* belum dilakukan pembangunannya. Sementara untuk pembangunan zona A ini dianggarkan melalui APBD Kabupaten Pelalawan *Multi Years* tahun 2014-2016 sebesar 29,75 Milyar Rupiah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Pembangunan Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (STTP) yang masih tahap pengerjaan
2. Pembangunan *Research dan Development Center* belum dilakukan pembangunannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam peneliti ini adalah;

1. Apa saja upaya Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pembangunan Kawasan Pendidikan?
2. Apa kendala Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pembangunan Kawasan Pendidikan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pembangunan kawasan pendidikan.
 - b. Untuk mengetahui kendala Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pembangunan kawasan pendidikan.
2. Manfaat Penelitian
- Manfaat penelitian ini diharapkan agar mendapatkan hasil yang mampu memberikan manfaat yaitu:
- a. Bagi Akademis dapat menambah literatur bahan kajian penelitian dalam pengembangan Pembangunan Kawasan Pendidikan kepada peneliti-peneliti lainnya.
 - b. Bagi Instansi sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan serta dapat membantu Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk mengetahui Kapasitas Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam Pembangunan Kawasan Pendidikan, khususnya dalam mengembangkan Pembangunan Kawasan Pendidikan.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Kapabilitas

Menurut Amir (2011-86), menjelaskan bahwa kapabilitas ialah

kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun didalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Ibarat individu, belum tentu seseorang yang memiliki bakat, misalnya pemain piano bisa bermain piano dengan baik. Ini sangat ditentukan dengan bagaimana ia mengembangkan dengan latihan, dan belajar. Hal tersebut didukung oleh pendapat Robbin yang mengartikan bahwa kemampuan merupakan sebuah kapasitas yang dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan merupakan suatu penilaian atau ukuran dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut.

Menurut Moenir (1998-116), kapabilitas atau kemampuan adalah berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas dan pekerjaan berarti dapat melakukan tugas, pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat dan keadaan ditujukan kepada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan atas dasar ketentuan yang ada. Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia.

Menurut Sampurno (2011-40), kapabilitas merepresentasikan seperangkat sumber terintegritas yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas penting. Kapabilitas atau kemampuan menyatu dalam

pengetahuan dan keterampilan pekerja atau individu yang ada dalam perusahaan ataupun organisasi. Kapabilitas diartikan sebagai potensi untuk menjalankan aktivitas tertentu atau serangkaian aktivitas. Terkadang istilah “kecakapan” digunakan untuk merujuk pada kemampuan kita menjalankan aktivitas fungsional, sementara “kapabilitas” dianggap bagaimana mengkombinasikan berbagai kecakapan. Amir (2011-88)

Menurut Kusumasari (2014-48), sumber daya dan faktor penting yang harus dilihat dalam menilai kapabilitas adalah :

a. Kelembagaan

Pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin *networking* dengan semua level pemerintah.

b. Sumber Daya Manusia

Memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan dan delegasi yang jelas, serta memiliki personel dengan pengetahuan yang baik.

c. Keuangan

Memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung semua aktivitas.

d. Sumber Daya Teknis

Memiliki sistem logistik manajemen dan, informasi yang efektif kepada seluruh masyarakat. Selain itu juga sistem informasi teknologi dan jaringan komunikasi antara organisasi, masyarakat dan perwakilan media haruslah memadai.

2. *Good Governance*

Menurut Koiman (2009: 273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita Hak Azasi Manusia. Dalam konteks ini *good governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut OECD dan *World Bank* (Sedarmayanti, 2009: 273), *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta pendiptaan kerangka

kerja politik dan hukum bagi tumbulnya aktivitas kewiraswastaan.

Menurut Rochman (2009:276) *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif. Menurut dokumen *United Nation Development Program* (UNDP: 2004), tata kelola pemerintahan yang baik adalah "Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas social dalam masyarakat.

Dalam hal *Good Governance*, Basuki (2006) mengartikan sebagai upaya merubah watak pemerintah (*Government*) yang semula cenderung bekerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, menjadi pemerintah yang aspiratif. Lain halnya dengan Basuki, Tjiptoherijanto (2010) mendefinisikan *Good Governance* dari sudut pandang harapan aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan, yang menyatakan bahwa *Good Governance* adalah tata kelola yang berupaya memenuhi harapan-harapan pihak yang terlibat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya keterlibatan para *stakeholder*, maka pengambilan keputusan dalam pelayanan publik akan mendapatkan pertimbangan yang matang dan semua keinginan para *stakeholder* akan tercapai.

Adapun unsur-unsur *stakeholder Governance* menurut Sjamsuddin

(2006) meliputi; individual, organisasi, institusi, dan kelompok sosial yang keberadaannya sangat penting bagi terciptanya tata pemerintahan yang efektif. Unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu:

a. Negara (*State*)

Pengertian negara/pemerintah (*State*) dalam hal ini secara umum mencakup keseluruhan lembaga politik dan sektor publik. Peranan dan tanggung jawab negara atau pemerintah adalah meliputi penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah, dan membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik pada level lokal, nasional, maupun internasional dan global.

b. Sektor swasta (*Private sector*)

Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti: industri pengolahan (*manufactur*), perdagangan perbankan, dan koperasi, termasuk juga kegiatan sektor informal. Peranan sektor swasta sangat penting dalam pola pemerintahan dan pembangunan, karena perannya sebagai peluang untuk perbaikan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi.

c. Masyarakat Madani (*Civil society*)

Masyarakat madani meliputi perseorangan dan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Masyarakat madani tidak hanya

melakukan *check and balances* terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah dan sektor swasta tetapi juga memberikan kontribusi dan memperkuat kedua unsur yang lain, seperti membantu memonitor lingkungan, penipisan sumber daya, polusi dan kekejaman sosial, memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dengan membantu mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dalam masyarakat, dan menawarkan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki standar hidup mereka. (MughtarLuthfi Malik A1-Azhar, dkk. 2013: 1048-1057).

E. Metode Penelitian

Untuk melihat, mengetahui, serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah atau tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Taylor dan Bogdan, menyatakan bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pelalawan tentang Kapasitas Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam Pembangunan Kawasan Teknopolitan (studi Pembangunan Sekolah Tinggi

Teknologi Pelalawan). Karena di kawasan pendidikan yang direncanakan akan dibangun dari TK, SD, SMP, SMA dan Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (STTP) belum selesai dan hanya Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan yang dalam proses pembangunan, sementara dalam perencanaannya kawasan pendidikan selesai tahun 2017 sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini dikumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terkait dengan kapasitas Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pembangunan kawasan Teknopolitan. Data primer diperoleh dari;

- a. Observasi**
- b. Wawancara**
- c. Dokumentasi**

2) Data Sekunder,

Data yang diperoleh dari keterangan sumber-sumber lainya yang dapat

menunjang objek yang diteliti yaitu berupa:

- a. Gambaran umum Kabupate Pelalawan
- b. Pengembangan kawasan Teknopolitan

a. Sumber Data

1. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Dalam penentuan informan pertama-tama dipilih satu orang atau dua orang, namun karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dapat lebih tahu atau melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Informan penelitian ini dipilih secara *purposive* untuk penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sugiyono (2002: 96). Selanjutnya Lexy J. Moleong (2008: 38), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif mendapatkan informasi yang benar valid.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian akan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara
Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui

wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan.

- b. Penelusuran Dokumentasi
Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

- c. Observasi
Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari

fenomena analisis yang ada.

4. Teknik Analisa Data

Analisis Data atau Pengolah Data adalah bentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam juga membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Dimana dalam analisis ini, fokus penelitian maupun pembahasan kendati diarahkan pada bidang atau aspek tertentu, namun pendiskresian fenomena yang menjadi tema sentral dari permasalahan penelitian diungkapkan secara rinci.

Analisa tabel tunggal dipergunakan untuk data yang diperoleh dengan metode survai, sedangkan untuk data kualitatif yang diperoleh dengan wawancara mendalam, dan observasi dilakukan analisa dengan metode analisis *operational component* berikut. Dalam pelaksanaan analisis data kualitatif bertujuan pada penggalian makna, penggambaran, penjelasan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing. Uraian data jenis ini berupa kalimat-kalimat, bukan angka-angka atau tabel-tabel. Untuk itu data yang diperoleh harus diorganisir dalam struktur yang mudah dipahami dan diuraikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam Pembangunan Kawasan Pendidikan

Merujuk kepada konsep atau gagasan yang diungkapkan oleh Kusumasari tentang kapabilitas, yaitu sebagai berikut :

1. Kelembagaan

Dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan teknopolitan khususnya kawasan pendidikan telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang mana terdapat dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Teknopolitan Pelalawan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan. Adapun fungsi UPT adalah sebagai berikut:

- a. Pengelola Administrasi Kawasan
- b. Promosi dan Publikasi Pembangunan Kawasan
- c. Penghubung antara Masyarakat, Pengusaha, Investor dengan Tim Kebijakan serta pengawasan lapangan implementasi Program Pembangunan Kawasan
- d. Koordinasi Implementasi Program Pembangunan Kawasan Teknopolitan
- e. Memfasilitasi Perizinan di dalam Kawasan

2. Sumber Daya Manusia

Dalam kawasan pendidikan, Sumber Daya Manusia merupakan salah satu yang terpenting. Tenaga pengajar

sangat diperhatikan kualitasnya dan ditempatkan dalam bidang yang sesuai, dimana Yayasan Amanah Pelalawan sebagai pengelola ST2P terus mempersiapkan SDM melalui program beasiswa ke UTM sejak 2012 untuk S2 dan S3, serta melakukan kerjasama dengan UIR untuk S1 mulai Tahun 2014. Proses pendidikan dan penelitian dijalankan sejak September 2012, yakni mempersiapkan Tenaga Dosen berkualifikasi S3 dengan mengirim ke UTM Johor Bahru sebanyak 5 orang : 2 orang Agroteknologi, 1 orang Teknik Kimia, 1 orang Teknik Elektro dan 1 orang Teknik Industri.

3. Keuangan

Dalam pembangunan tentu diperlukan dukungan keuangan atau anggaran untuk mendukung dan melancarkan pembangunan tersebut. Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah mengalokasikan dana melalui APBD dari tahun 2014-2016.

4. Sumber Daya Teknis

Merujuk pada teori yang dikembangkan oleh Kusumasari, dalam upaya pengembangan kawasan pendidikan sebagai salah satu komponen dalam perwujudan visi Kabupaten Pelalawan. Sumber daya teknis yang artiannya memiliki sistem manajemen dan informasi yang efektif kepada seluruh masyarakat. Dalam upayanya untuk mengembangkan kawasan pendidikan, oleh Unit Pelaksana Teknis dalam

pelaksanaan tugas yang pada akhirnya berupaya untuk mewujudkan kawasan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan. Dalam unit tersebut telah dibentuk susunan organisasi, yang mana struktur organisasi merupakan sebuah upaya teknis di dalam unit untuk dapat menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi dari masing-masing bagian di dalamnya, yang mana bagian-bagian tersebut dibagi menjadi dua, yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Yang mana pembagian ini dimaksudkan agar tidak yang namanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

1. Upaya Politis

Pembangunan teknopolitan ini jelas membutuhkan dana yang sangat besar, untuk membangun kawasan pendidikan saja dibutuhkan dana lebih kurang 30 miliar, semetara untuk membangun kawasan pendidikan ini diambil dari APBD Kabupaten Pelalawan, kalau pembangunan kawasan pendidikan ini dari APBD tentu pembangunannya secara bertahap, mengingat setiap proyek pemerintah mesti dianggarkan melalui anggaran daerah, dan melalui persetujuan DPRD Kabupaten Pelalawan, oleh karena itu pembangunan kawasan pendidikan ini mengalami keterlambatan dalam pembangunannya. Sehingga sampai saat ini pembangunan kawasan pendidikan ini mengalami keterlambatan dalam pembangunannya, sementara baru ada beberapa bangunan di kawasan

pendidikan ini. Sementara kawasan ini akan dibangun beberapa jenjang pendidikan seperti taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, serta perguruan tinggi.

2. Upaya Teknis

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar pembangunan kawasan teknopolitan dengan melakukan pembebasan lahan, karena kawasan teknopolitan merupakan hutan produktif dan hutan penyangga, sehingga proses pelepasan lahan dan perizinan yang lama sehingga berdampak dalam pembangunan kawasan lainnya seperti kawasan pendidikan yang direncanakan rampung tahun 2016 ini, namun sampai saat ini kawasan pendidikan baru dibangun beberapa gedung saja, sementara kawasan pendidikan direncanakan pendidikan dibebagai jenjang dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Berkat perjuangan yang panjang untuk pelepasan lahan hutan produktif dan penyangga ini, maka pemerintah Kabupaten Pelalawan baru mendapatkan izin pada 23 April 2015.

B. Kendala Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kawasan Pendidikan

Kawasan teknopolitan merupakan suatu kawasan industri yang terpadu dengan perguruan tinggi sebagai pencetak tenaga kerja terampil dan pusat riset sebagai pendorong inovasi, dibangun atas dukungan investasi swasta dan pemerintah.

Secara khusus pembangunan kawasan teknopolitan Pelalawan memiliki manfaat baik untuk masyarakat di Kabupaten Pelalawan sendiri, manfaat bagi koridor ekonomi Sumatera, dan manfaat secara nasional dalam pencapaian visi MP3EI. Sementara itu visi pembangunan kawasan teknopolitan itu; “menjadi kawasan utama Pelalawan bagi pemajuan dan pemanfaatan IPTEK dan inovasi berkelas dunia yang ramah lingkungan”.

Sedangkan misi dalam pembangunan kawasan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan yakni;

1. Mengembangkan SDM berkualitas
2. Mendorong mengembangkan budaya kreatif dan inovatif masyarakat daerah
3. Mengembangkan pusat-pusat keunggulan untuk mendorong pemajuan dan pemanfaatan secara berlebihan.
4. Menumbuh kembangkan bisnis-bisnis inovatif
5. Mendukung pengembangan keunggulan (daya saing) khas daerah.
6. Memberikan pelayanan berbasis IPTEK
7. Mengelola pembangunan hijau.

1. Pembebasan Lahan

Kendala dalam pembangunan kawasan teknopolitan dan kawasan pendidikan merupakan masalah perizinan dan juga pembebasan lahan, jika satu saja perizinannya tidak keluar maka pembangunan kawasan

teknopolitan akan terkendala termasuk pembangunan kawasan pendidikan, karena kawasan pendidikan akan dibangun dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, izin dan pembebasan lahan belum selesai maka semua pembangun tidak maksimal dilakukan.

2. Anggaran

Pembangunan teknopolitan ini jelas membutuhkan dana yang sangat besar, untuk membangun kawasan pendidikan saja dibutuhkan dana lebih kurang 30 miliar, semetara untuk membangun kawasan pendidikan ini diambil dari APBD Kabupaten Pelalawan, kalau pembangunan kawasan pendidikan ini dari APBD tentu pembangunannya secara bertahap, mengingat setiap proyek pemerintah mesti dianggarkan melalui anggaran daerah, dan melalui persetujuan DPRD Kabupaten Pelalawan, oleh karena itu pembangunan kawasan pendidikan ini mengalami keterlambatan dalam pembangunannya. Sehingga sampai saat ini pembangunan kawasan pendidikan ini mengalami keterlambatan dalam pembangunannya, sementara baru ada beberapa bangunan di kawasan pendidikan ini. Sementara kawasan ini akan dibangun beberapa jenjang pendidikan seperti taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, serta perguruan tinggi.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Kedala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam pembangunan kawasan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan dalam mengalih fungsikan kawasan hutan penyangga menjadi kawasan teknopolitan adalah mendapatkan izin alih fungsi hutan, selanjutnya anggaran untuk melakukan pembangunan kawasan pendidikan, karena untuk membangun kawasan pendidikan dibutuhkan dana sebesar 30 miliar Rupiah. Anggaran yang besar ini mesti dianggarkan melalui APBD Kabupaten Pelalawan dengan proyek multi year.
2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam Pembangunan kawasan teknopolitan, terutama untuk pembangunan kawasan pendidikan dengan dana lebih kurang 30 miliar, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui politis dan teknis. Upaya politis yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan lobi-lobi politik untuk pembangunan kawasan pendidikan karena anggaran untuk pembangunan kawasan ini dibutuhkan pembangunan

proyek multi year dengan nilai proyek 30 miliar. Upaya tenis yang dilakukan pemerintah dengan mengandenga Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan dan melanjutkan pembangunan kawasan pendidikan.

B. Saran

1. Kepada pemerinah Kabupaten Pelalawan agar pembangunan kawasan pendidikan sesuai dengan master plan
2. Kepada DPRD Kabupaten Pelalawan agar memudahkan pengajuan anggaran yang diajukan oleh pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan pendidikan.
3. Masyarakat Kabupaten Pelalawan agar mengawasi proses pembangunan kawasan teknopolitan sesuai dengan yang diinginkan.
4. Kepada pihak swasta agar berinvestasi dalam pembangunan kawasan teknopolitan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arsyad, L. 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPF.

Bovaird, Tony (Diedit oleh Tony Bovaird dan Elke Loffler).

2003. *Strategic Management in Public Sector Organizations*. New York. Routledge.

Bryson, J. dan W. Roering. 1987. *Applying private-sector strategic management in the public sector dalam Handbook of Strategic Management*, Jack Rabin, Gerald J. Miller, W. Bartley Hildreth, 2000. New York: Marcel Dekker, Inc.

Ermaya Suradinata. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Bandung: Ramadan.

Lexy J. Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Liou, Kuotsai Tom. 2000. *Strategic Management and Economic Development dalam Handbook of Strategic Management*, Jack Rabin, Gerald J. Miller, W. Bartley Hildreth,. New York: Marcel Dekker, Inc.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.

Nawawi. Hadari. 2000. *Manajemen Stratejik Organisasi Non Profit Di bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi Di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rohdewohld, Rainer. 1995. *Public Administration in Indonesia*.

Melbourne : Montech PTY,
Ltd.

Administrasi Publik (JAP),
Vol, 1, No. 5 hal. 1048-1057

Soesilo, Nining I. 2002. *Manajemen Strategik di Sektor Publik (Pendekatan Praktis)*. Buku II. MPKP-FEUI. Jakarta.

Rizki Rahajuning Tyas, *Strategi Pembangunan Wilayah Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur*, 2006, Institut Pertanian Bogor

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

M.Ratna Juwita Ningtyas, Heru Ribawanto, Minto Hadi, Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan (Studi Kasus pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kota Blitar), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4

Yeremias T. Keban. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media

B. Jurnal

Haris Faozan, 2010, *Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Sebagai Agenda Utama Optimasi Pengelolaan Daerah Perbatasan*

Dokumen Pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional Tahun 2014

Dokumen Profil Kabupaten Pelalawan tahun 2015

Gandara Rida. 2008. *Capacity Building Dosen pada Jurusan di Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara*. Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Pendidikan Fakultas Pendidikan UPI: Bandung

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Muchtar Luthfi Malik Al-Azhar, dkk, *Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta dalam Pelayanan Publik (Studi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara)*, *Jurnal*

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten
Pelalawan Tahun 2011-2016

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 32
tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pembangunan
Kawasan Teknopolitan
Pelalawan.

Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pelalawan 2011-
2016.